

PENETAPAN DAN KEPATUHAN TERHADAP DISPENSASI PASANGAN MUDA TERKAIT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
syafruddinsyam@uinsu.ac.id

ABSTRAK : Adanya pembatasan usia pernikahan diharapkan agar para calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu segi kesehatan, psikologis, jasmani dan rohani sehingga kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dapat tercapai. Batas usia pernikahan merujuk kepada Undang-Undang **No. 16 Tahun 2019** perubahan atas **UU No. 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan yang awal mula usia bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, diubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Dengan adanya batas usia Pernikahan ternyata tidak sedikit yang ingin menikah dibawah usia pernikahan tersebut, untuk itu calon mempelai berupaya meminta **Dispensasi Nikah** di Pengadilan Agama. Hasil ini menunjukkan bahwa permintaan **Dispensasi Nikah** yang diajukan di PA Yogyakarta di tahun 2019 dengan jumlah 40 permohonan. disebabkan oleh beberapa faktor yang didominasi oleh faktor hamil diluar nikah, bahkan ada yang sudah melahirkan. Dalam proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal dan pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah berdasarkan alasan dan bukti nyata yang cukup, sehingga jika alasan-alasan dan bukti tersebut terpenuhi, hakim dapat mengabulkan dengan dalih menolak bahaya harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Batas Usia Pernikahan.

A. PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan selalu berharap dapat menjadi keluarga yang Berbahagia lahir dan batin yang biasa disebut keluarga **Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah**. Dengan adanya harapan seperti itu maka **UU Perkawinan** yang terbaru yaitu **UU No. 16 Tahun 2019** atas dari perubahan **UU No. 1 Tahun 1974** telah menentukan syarat yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Diantaranya terdapat Pasal 7 Ayat 1 menyatakan: "**Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita mencapai Umur 19 (Sembilan Belas) Tahun**". Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak Pria atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi

kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup.

Karena itu, ketentuan usia kawin sudah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan ternyata dalam pelaksanaannya tidak sedikit calon mempelai yang datang untuk daftar nikah di KUA masih berusia dibawah 19 tahun. Dengan alasan yang beragam salah satu alasanya yaitu calon istri telah hamil diluar nikah.¹¹ Karena usia mereka masih dibawah umur dan tidak memenuhi ketentuan batas usia perkawinan, maka hal tersebut menjadi dasar Kepala KUA menolak untuk menikahkan calon mempelai yang masih dibawah umur. Selain itu biasanya Kepala KUA juga menyarankan agar kedua orang tua mempelai baik mempelai pria ataupun wanita jika tetap ingin anaknya menikah di usia tersebut, maka dapat melakukan permintaan Dispensasi di PA dimana lokasi mereka berada.

Permintaan dispensasi nikah tidaklah mudah dan harus membutuhkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Agama biar dapat pemohonan Dispensasi Nikah yang diajukan, lantas bagaimana prosedur dispensasi nikah, dan apa yang telah dapat **Permohonan Dispensasi Nikah**. Kemudian, bagaimana Pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan yaitu Ikatan yang menghalalkan hubungan yakni Pria dan Wanita. setelah persyaratan nikah yang ditentukan oleh Undang-undang dan adanya ikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi dari pihak baik istri dan suami.

Pernikahan dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan yang mengikat pria dan wanita untuk dapat melakukan hubungan yang awalnya diharamkan menjadi halal demi terciptanya kebahagiaan hidup lahir dan batin dengan cara yang dirahmati Allah.²

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi **Tentang Perkawinan** yang tertera pada pasal 1 yakni: Perkawinan yakni ikatan lahir

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Budi Aksara, 1996), 5

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press 2000), 14.

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Jika dipahami secara mendalam, maka akan menimbulkan sebuah nilai yang sangat bermakna.

Supaya Perkawinan sah dimata hukum, maka perkawinan wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³

- 1) Sebuah perkawinan supaya bisa legal perlu dilaksanakan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Didalam KUHPerdara Tidak mengenal perkawinan poligami ataupun perkawinan bigami karena asas yang diterapkan adalah asas monogami.
- 3) Agar perkawinan sesuai dengan tujuannya maka perkawinan diharapkan dapat terus berlangsung sampai maut memisahkan (kekal dan abadi).

Terdapat Ayat **Tentang Pernikahan** yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara Tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu Pasangan-pasangan dari jenis kamu Sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu Mawaddah dan Rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum [30]: 21).*⁴

b. Rukun dan Syarat

Terciptanya dalam suatu pelaksanaan perkawinan maka pernikahan harus memenuhi rukun sebagai berikut:

- 1) Wajib memiliki Calon Pria
- 2) Wajib memiliki Calon Wanita
- 3) Wajib memiliki Wali dari Calon mempelai Wanita.
- 4) Wajib terdiri dari Dua Saksi (laki-laki)
- 5) Wajib Ijab disampaikan oleh Wali dari Calon Istri kemudian ada Qabul yang disampaikan mempelai Pria.

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 132.

⁴ M. Quraish Shiab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 33.

Adapun syarat Nikah sebagai berikut:⁵

- 1) Kedua mempelai Wajib Agama Islam.
- 2) Wajib Berakal, Baligh dan Mukallaf.
- 3) Kemudian tidak ada hubungan keluarga/semenda.
- 4) Tidak memiliki Pernikahan dengan orang lain.⁶

c. Tujuan Nikah

Menurut UUP Tahun 1974 tertera yakni pasal pertama: “**Membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa**”. Selain Undang-undang perkawinan tujuan Pernikahan dirumuskan oleh KHI yang tertera Pasal 3 KHI yaitu: *Bertujuan Untuk Membentuk Kehidupan Rumah Tangga*.⁷

Di dalam Islam, perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyempurnakan agama dan memenuhi terhadap Naluri Hidup Manusia, sehingga istri dan suami dapat berhubungan secara terhormat demi membentuk keluarga yang bahagia sesuai ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW.⁸

Al-Qur’an pun menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan yakni agar umat Islam dapat memiliki keturunan yang sah kemudian dapat melanjutkan Generasi Umat Islam. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: *Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah SWT menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, Laki-laki dan perempuan.* (Q.S An-Nisa [4]: 1).⁹

d. Prinsip atau Asas Pernikahan

UU Perkawinan memiliki Prinsip dan Asas perkawinan yaitu:¹⁰

- **Perkawinan** bertujuan mewujudkan hubungan yang kekal dan bahagia baik lahir dan batin, sehingga Pasangan Suami istri menjalankan hubungan-nya wajib yang dimana hak dan

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 58.

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 132.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2000), 13.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 46.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

kewajibannya agar terciptanya kesejahteraan & kebahagiaan bersama.

- **Perkawinan** sah setelah dilakukan menurut kepercayaan Agama dianutnya. Kemudian, perkawinan juga harus dicatatkan dengan prosedur yang Berlaku agar para pihak mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum.
- **Di Indonesia menganut Asas Monogami dimana suami hanya memiliki satu istri.** kecuali para pihak Hukum dan Agamanya mengizinkan Suami lebih dari satu dengan disertai Alasannya cukup maka Suami boleh memiliki isteri dari satu dengan meminta Izin Poligami di Pengadilan Agama.
- Syarat Perkawinan telah ditentukan batas usia agar dapat Melaksanakan perkawinan umur 19 tahun yaitu pria dan 16 tahun bagi wanita (**UU No. 1 Tahun 1974**), sedangkan Undang-undang terbaru yaitu (**UU No. 16 Tahun 2019**), Berusia Minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Adanya syarat Usia Perkawinan tersebut supaya pihak yang akan melaksanakan pernikahan sudah matang, kemudian siap secara psikologis, Fisik maupun Psikis. sehingga mewujudkan Perkawinan yang didambakan dan dapat Menghindari terjadinya Perceraian dikemudian hari.
- Bahwa UU Perkawinan di Indonesia menyulitkkan suatu perceraian, sehingga apabila para pihak ingin melakukan perceraian harus dapat mengajukan bukti-bukti dan alasan-asalan yang cukup di sidang Pengadilan Agama.

Maka terjadinya pernikahan di Indonesia yang sesuai Hukum yang ada di Indonesia, kemudian antara istri maupun suami memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut:¹¹

- Istri dan suami harus mampu hidup berumah tangga secara harmonis dan utuh.
- Yang memimpin rumah tangga adalah suami dan yang menjadi ibu rumah tangga adalah istri.
- Antara istri dan suami memiliki kedudukan yang sama (seimbang) dimata hukum, oleh karena itu para pihak dapat melalukan tindakan hukum sendiri tanpa adanya intervensi.

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 136.

- Antara istri dan suami memiliki keadaan yang sama dalam menjalankan fungsi sebagai keluarga.
- Istri harus tinggal bersama dalam satu rumah bersama suami supaya dapat terciptanya kehidupan yang harmonis baik satu sama lain ataupun dengan anak.
- Antara istri dan suami wajib hukumnya untuk mencintai, menghormati, menyayangi satu sama lain dan mampu menolong lahir maupun batin jika salah satu mengalami kesulitan.
- Yang paling terpenting Suami ialah pemimpin Rumah tangga. wajib memenuhi kebutuhan keluarga baik kepada istri maupun anak dan juga wajib melindungi keluarganya dari perbuatan negatif yang dilakukan oleh orang lain. Jadi bisa dikatakan Suami memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan Istri.¹²

e. Batas Umur Pernikahan di Indonesia

Umur pernikahan yang sudah ditentukan, agar seseorang yang ingin melaksanakan Nikah dapat mengetahui syarat minimal usia pernikahan dan jika mereka belum memenuhi syarat pernikahan mereka dapat menunggu hingga usia mereka sesuai dengan batas minimal pernikahan atau mereka dapat melakukan Dispensasi Nikah **Pengadilan Agama** kemudian memberikan Alasan dan Bukti.

Batas Umur di Indonesia tertera didalam **UU** Perkawinan yang terbaru (UU No. 16 Tahun 2019). Tentang perkawinan, dimana Usia pernikahan disebutkan didalam Pasal 7 (ayat 1). intinya Perkawinan dilakukan apabila kedua belah pihak baik telah menggapai usia 19 tahun. Ayat yang lain disebutkan apabila terjadi penyimpangan Batas Usia umur yang telah ditentukan pada Ayat 1 tersebut, **Orang Tua** dari pihak pria atau orang tua dari pihak wanita dapat mengajukan Permohonan Nikah di PA disertai pernyataan yang telah memiliki Bukti.¹³

Inti daripada dibentuknya batas usia pernikahan di Indonesia tersebut adalah agar calon isteri dan calon suami sebelum melaksanakan perkawinan harus sudah memenuhi syarat umur yang berlaku dengan harapan terciptanya pasangan yang sudah siap jiwa dan raganya agar dapat menempuh dikehidupan Rumah tangga demi Kehidupan Harmonis, bahagia, dan sejahtera tak lupa pula yang paling terpenting dari adanya pembatasan usia perkawinan yaitu

¹² *Ibid.*

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan.*

terciptanya pasangan yang sehat jasmani dan rohani baik istri dan suami ataupun anak yang kelak dilahirkan.

Selain di Indonesia, terdapat di Negara lain Terkhususnya Negara Islam menerapkan adanya Pembatasan Usia Penikahan. Adapun batas usia tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁴

- Algeria, pria 21 tahun dan wanita 18 tahun.
- Yordania, minimal 16 tahun Pria dan minimal 15 Tahun untuk wanita.
- Libanon, Negara ini batas usia Pria 18 tahun dan wanita 17 Tahun
- Malaysia, di negara tetangga ini usia pernikahan, Pria 18 tahun dan Wanita 16 tahun.
- Somalia, melaksanakan Nikah di negara Somalia maka antara suami dan istri harus berusia 18 tahun.
- Syiria, Pria usia 18 tahun Kemudian usia 17 tahun untuk wanita.

Negara-negara yang telah disebutkan diatas melarang untuk Pernikahan yang dibawah Umur, kecuali adanya izin oleh pihak Hakim ataupun Negara.¹⁵

f. Dispensasi Pernikahan

Dispensasi tersebut ialah keringanan ataupun Pengecualian yang diberikan PA terhadap Calon yang melaksanakan Nikah dan belum Mencapai Usia yang Telah ditentukan UU. sehingga orang tua dari pemohon baik Orang tua Pria ataupun Orang Tua Wanita. sehingga mengajukan *permohonan Dispensasi* Di PA dimana tempat pemohon berada.¹⁶

Sehubungan dengan pengertian diatas maka dispensasi nikah merupakan kebijakan dari pemerintah yang mengharapakan pernikahan terjadi berdasarkan kematangan para mempelai sehingga para mempelai dapat hidup berumah tangga dengan harmonis dan dapat mencegah perceraian yang terjadi dikemudian hari. Akan tetapi jika dalam keadaan terdesak maka undang-undang membolehkan pernikahan dibawah umur asalkan di izinkan oleh Pengadilan Agama.¹⁷

Dalam Fiqh tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena dalam Islam sendiri tidak terdapat ketegasan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan akan tetapi para ulama sepakat bahwa pria dan wanita dapat

¹⁴ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 48.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 183.

¹⁷ *Ibid.*

melakukan pernikahan jika sudah mencapai 'aqil dan baligh bagi keduanya.¹⁸ Adapun beberapa pendapat ulama tentang baligh adalah sebagai berikut:

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, seseorang dapat dikatakan baligh apabila memiliki beberapa tanda yang bisa dilihat seperti tanda keluarnya sperma (*ihtilām*) pada saat tertidur ataupun sadar bagi pria, dan keluarnya darah haidh bagi wanita.¹⁹

Menurut Ibnu Katsir, seseorang dikatakan sudah baligh apabila telah Mimpi Tidur Yang sebab Keluarnya Mani Yang Mana Mani Tersebut menjadikan Anak, adapun jika dihitung dalam tahun maka seorang dapat dikatakan baligh apabila sudah berumur sekitar 15 tahun.²⁰

Kemudian Imam Malik, tanda seorang sedang Baligh dapat dilihat dari keluarnya Mani yang Mutlak baik keadaan tertidur ataupun dalam keadaan menghayal selain itu dapat pula dilihat dengan adanya rambut di kemaluan. Sedangkan Menurut Umur Imam Malik menentukan 17 Tahun yaitu Pria Dan Wanita supaya Dapat Melangsungkan Pernikahan.²¹

Imam Syafi'i, Orang yang sudah baligh apabila Usia 15 tahun bagi pria dan Wanita Usia 9 tahun.²²

Menurut Hamka, seseorang dapat melangsungkan pernikahan tidak bergantung kepada umur akan tetapi jikalau seseorang tersebut telah memiliki kecerdasan dan kedewasaan dalam berpikir maka telah dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan.²³

Adapun landasan tentang baligh nya seseorang terdapat surah An-Nur (Ayat 59):

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan apabila Anak-Anakmu telah sampai umur Balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka Meminta Izin.

¹⁸ Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmy Wa al-Qadhāyā al-Mu, āshirah*, Juz 3, (Damaskus: Dar al Fikr, 2013), 558.

²⁰ Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azim, Juz II*, (Mesir: Dār al-Kutub, tt), 236.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Moeh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Al-Qanun*, No. 1 (2016): 75, <http://digilib.uinsby.ac.id/27834/>.

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nur [24]: 59).

Adapun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah yang mana Aisyah berumur 6 Tahun Sebagaimana Hadis Yang Berbunyi:

**تزوجها رسول الله ﷺ وهي بنت ست ، وبنى بها
وهي بنت تسع ، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم).**

Artinya: *Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan Beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan Beliau wafat pada usia delapan belas tahun. (HR. Muslim).*²⁴

Di Indonesia Tentang Dispensasi Nikah yakni (**UU No.16 Tahun 2019**). Perubahan Atas (**UU No.1 Tahun 1974**). Tentang Perkawinan. *Dijelaskan Pasal 7 Ayat (1) Bahwa "Perkawinan hanya diizinkan Apabila Pria Dan Wanita Sudah Mencapai Umur 19 (Sembilan Belas) Tahun". Pasal 7 Ayat (2) "Dalam Hal Terjadi Penyimpangan Terhadap Ketentuan Umur Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Orang Tua Pihak Pria Dan/Atau Orang Tua Pihak Wanita Dapat Meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Dengan Alasan Sangat Mendesak Disertai Bukti-Bukti Pendukung Yang Cukup. Pasal 7 Ayat (3) (Pemberian Dispensasi Oleh PA Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Wajib Mendengarkan Pendapat Kedua Belah Calon Mempelai Yang Akan Melangsungkan Perkawinan).*²⁵

Kemudian (Pasal 65 Dan Pasal 66), terdapat satu Pasal yaitu Pasal 65A yang pada intinya: ***(Pada Saat UU Ini Berlaku, Permohonan Perkawinan Yang Telah terdaftar Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, Prosesnya tetap Sesuai Dengan Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974).***²⁶

Pada PMA No. 3 Tahun 1975 menentukan bahwa:

- a. *Dispensasi Yang Berada Di Pengadilan Agama Yakni Izin Nikah (Penetapan) Berupa Dispensasi Untuk Calon Pria Yang Belum Usia 19 Tahun Dan Calon Wanita Yang Belum Usia 16 Tahun Yang Diberikan*

²⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t), 595.

²⁵ UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

²⁶ *Ibid.*

*Oleh Pengadilan Agama.*²⁷ (Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 Pasal 1 (2) sub g).

- b. *Jika mempelai pria belum usia 19 tahun dan mempelai wanita belum menggapai usia 16 tahun yang melaksanakan perkawinan, harus dapat dispensasi dari pengadilan Agama.*²⁸ (Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 Pasal 13 (1)).

Yang hendak melaksanakan perkawinan/pernikahan, **Orang tua** dari mempelai mengajukan Permohonan Dispensasi Di **PA**. Adapun Prosedurnya yaitu:

- 1) **Surat Permohonan** Dispensasi Nikah dibuat oleh salah satu dari Orang tua dan Anaknya dibawah batas Usia ke PA di Wilayah lokasi permohon bertempat tinggal.
- 2) **Surat Permohonan** Dispensasi Nikah Boleh Diajukan secara bersama-sama dari Kedua Orang tua. baik Orang tua Pria atau orang tua Wanita kepada Pengadilan Agama di mana masing-masing bertempat tinggal.²⁹
- 3) **Hakim Pengadilan Agama** memberikan Dispensasi apabila Alasan dan Bukti yang diberikan para pihak seperti kedua mempelai, orang tua ataupun keluarga dekat telah cukup dan meyakinkan majelis hakim.
- 4) Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan tanpa adanya sengketa atau disebut juga dengan voluntair maka produknya disebut penetapan dan jika pemohon merasa tidak adil terhadap hasil akhir, Pemohon boleh Meminta **Upaya Hukum** Yaitu Kasasi.³⁰

²⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 *Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pasal 1 Ayat (2) Sub g.

²⁸ *Ibid.*, pasal 13 ayat (1)

²⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), 121.

³⁰ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 148.

**Tabel: Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2019**

No	Nomor Perkara	Alasan Permohonan	Ditetapkan Bulan
1	<i>2/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Hamil 3 Bulan	Januari
2	<i>14/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Sudah melahirkan	Februari
3	<i>18/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Untuk Menghindari Zina	Februari
4	<i>25/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Sudah Melahirkan	Maret
5	<i>29/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Untuk Menghindari Zina	April
6	<i>32/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Sudah Melahirkan	April
7	<i>34/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Sudah Melahirkan	Mei
8	<i>36/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Hamil 3 Bulan	Mei
9	<i>41/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Sudah Melahirkan	Juni
10	<i>43/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Untuk Menghindari Zina	Juli
11	<i>51/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Sudah Melahirkan	Agustus
12	<i>54/PdT.P/2019/PA.Yk</i>	Hamil 6 Bulan	Agustus
13	<i>58/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Sudah Melahirkan	September
14	<i>71/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Sudah Melahirkan	Oktober
15	<i>000/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Untuk Menghindari Zina	November
16	<i>xxx/Pdt.P/2019/PA.Yk</i>	Hamil dan Keguguran	Desember

Dengan adanya Data, maka terdapat Dispensasi Nikah Di PA Yogyakarta. *Yaitu Bulan Januari Sampai Bulan Desember 2019.* Sebanyak 16 permohonan dimana faktor terbesar dalam kasus tersebut didominasi oleh faktor hamil diluar nikah sebanyak 36 permohonan. Selain itu terdapat pula faktor untuk menghindari perbuatan yang dilarang syari'at Islam seperti perzinaan sebanyak

4 permohonan. Adapun permintaan permohonan dispensasi nikah tiap bulan selalu ada.³¹

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil ini, mendapatkan suatu kesimpulan yang antara lain:

1. Prosedur mengajukan *Permohonan Dispensasi Nikah* Di Pengadilan Agama Terdiri mulai Pra Meja yaitu untuk mencari informasi terkait prosedur Beracara di Pengadilan Agama, dilanjutkan ke Meja 1 untuk pendaftaran permohonan dan mengetahui rincian biaya perkara, dilanjutkan pembayaran ke Bank oleh pemohon, dilanjutkan penomoran Berkas Perkara oleh kasir sekaligus menandatangani Surat Pemohonan dan mengembalikannya Ke Pemohon, dilanjutkan ke Meja (2) untuk register permohonan, dilanjutkan penunjukan majelis hakim oleh ketua PA, dilanjutkan penentuan hari sidang oleh ketua majelis, dilanjutkan penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti (oleh panitera), dilanjutkan pemanggilan para pihak (oleh Jurusita/Jurusita Pengganti), dan terakhir dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang.
2. Faktor pasangan muda Mengajukan Pemohonan Dispensasi Nikah di PA pada Januari Sampai Bulan Desember tahun 2019 terdiri dari pertama, didominasi oleh faktor hamil di luar nikah (kecelakaan) dimana calon pasangan yang masih dibawah umur 19 tahun telah melakukan Hubungan Zina terlebih dahulu tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara Undang-undang, bahkan ada juga yang sudah sampai melahirkan baru mengajukan dispensasi nikah, kedua faktor agama yaitu karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan dilarang oleh syari'at Islam seperti perzinaan, mau tidak mau maka Orang tua mengajukan Dispensasi Nikah.
3. Pemohonan Dispensasi Nikah didasari oleh: pertama, *persyaratan-persyaratan dispensasi nikah*, Kedua, *Keterangan, Anak Pemohon, Calon Istri Dan Keluarga Dari Calon Istri*. Ketiga, alasan-alasan kemudian bukti-bukti yang diajukan. Keempat, kondisi psikologis dan kesehatan anak.

³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Dari Bulan Januari Sampai Bulan Desember 2019*, Dikutip Dari: <https://putusanmahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta>.

Kelima, ada tidaknya unsur paksaan. Keenam, ada tidaknya hubungan mahram.

D. DAFTAR PUSTAKA

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Roy Purwanto, Muhammad, *Reformulasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istishlahi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

UU No. 16 Tahun 1975. Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

UU No. 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Wawancara dengan Noor Emy Rohbiyati di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2019

Djamal, M, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.